

**PENGARUH KOMITMEN PIMPINAN DAN KUALITAS SDM
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris Pada SKPD di Pemerintahan Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1)*



Oleh :

FARDYAN
2006/77718

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : PENGARUH KOMITMEN PIMPINAN DAN KUALITAS SDM
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Studi
empiris pada SKPD Pemerintahan Kota Padang)**

NAMA : FARDYAN
NIM/BP : 77718/2006
KEAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Februari 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Syamwil, M.Pd
NIP: 19590820 198703 1 001

Fefri Indra Arza, SE, MSc, Ak
NIP: 19730213 199903 1 003

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi-Kuangan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

PENGARUH KOMITMEN PIMPINAN DAN KUALITAS SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Studi empiris pada SKPD Pemerintahan Kota Padang)

Nama : FARDYAN
NIM/BP : 77718/2006
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2011

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Syamwil, M.Pd	_____
2. Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	_____
3. Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	_____
4. Anggota	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	_____

ABSTRAK

Fardyan (2006/77718) Pengaruh Komitmen Pimpinan dan kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah(studi empiris pada SKPD pemerintahan kota Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2010.

Pembimbing I : Drs. Syamwil, M.Pd

Pembimbing II : Fefri Indra Arza, SE, Ak. M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh Komitmen pimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dan 2) Kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf akuntansi di seluruh SKPD pemerintahan kota Padang, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *total sampling*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS). Temuan penelitian menunjukkan: 1) pengaruh yang signifikan positif antara Komitmen Pimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 6,043 > t_{tabel} 2,0096$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,627, dan 2) pengaruh yang signifikan dan positif antara kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 7,106 > t_{tabel} 2,0096$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,753. Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan perluasan sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh kuat dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi empiris pada SKPD pemerintahan Kota Padang). Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Syamwil, M.Pd selaku pembimbing I, dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, Ak, M.Sc selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penelitian ini dan telah banyak memberikan masukan kepada penulis sampai penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
2. Ibu ketua Prodi dan Bapak sekretasis Prodi Akuntansi
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis.
4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.
5. Ayah dan ibu yang telah memberikan do'a, perhatian , dan kasih sayang serta pengorbanan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.

6. Kakak-kakak yang telah memberikan motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Teoritis	8
1. Laporan Keuangan Pemerintah	8
a. Pengertian Laporan Keuangan	8
b. Tujuan Laporan Keuangan	9
c. Komponen Laporan Keuangan.....	12
d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	13
2. Komitmen Pimpinan	18
a. Pentingnya komitmen	18

b. Kewenangan berdasarkan PP No. 58 tahun 2005	19
c. Kewenangan sebagai pengguna barang	20
3. Kualitas SDM	22
a. Persaingan dalam sumber daya manusia	22
b. Manajemen Sumber daya manusia	23
c. Kemampuan dalam melaksanakan fungsi	23
B. Penelitian Relevan	24
C. Kerangka Konseptual	26
D. Hipotesis Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Populasi Dan Sampel	29
C. Jenis Dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Variabel Penelitian	32
F. Instrumen Penelitian	33
G. Uji Validitas Dan Reliabilitas	35
H. Hasil Uji Coba Instrumen	37
I. Uji Asumsi Klasik	38
J. Teknik Analisis Data	40
K. Definisi Operasional	61

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Sampel Dan Responden Penelitian	46
B. Analisis Deskriptif	47
C. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas	56
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	58
E. Hasil Analisis regresi Berganda	61
F. Uji Model	63
G. Uji Hipotesis.....	65
H. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Keterbatasan	71
C. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang	30
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	34
3. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat	35
4. Nilai Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation	38
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	46
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	47
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Keahlian Yang Ditempuh	49
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	51
10. Statistik Deskriptif	52
11. Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Pimpinan	53
12. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas SDM	54
13. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	56
14. Nilai Cronbach's Alpha Penelitian	57
15. Nilai Corrected Item Total Correlation Penelitian	58
16. Uji Normalitas	59
17. Uji Multikolinearitas	60
18. Uji Heteroskedastisitas	61
19. Koefisien Regresi	62

20. Uji F Hitung	64
21. Uji Koefisien Determinasi	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian.....
2. Tabulasi Data Penelitian.....
3. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas Penelitian
4. Statistik Deskriptif
5. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas
6. Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang di percayakan kepadanya.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1), menyatakan bahwa bentuk dan isi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2006 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat umumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), termasuk didalamnya Pemerintah Kota Padang, pada tahun 2007 daerah yang memperoleh opini *Disclaimer* meningkat menjadi 5 daerah, salah satunya untuk hasil audit tahun 2007 BPK memberikan opini *Disclaimer* (Menolak Memberikan Pendapat) untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. Untuk Tahun Anggaran 2008 Kota Padang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal yang sama BPK berpendapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Padang tahun 2009, bersifat opini Wajar dengan pengecualian.

Opini ini disampaikan BPK kepada DPRD Padang dan dilanjutkan kepada Pemko Padang untuk dilakukan perbaikan selama 60 hari (*sumber: www.ANTARA.com, 27 September 2010*).

Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain masih lemahnya sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterlambatan penyampaian laporan keuangan karena kurangnya komitmen dari pimpinan dan jumlah serta kepahaman sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

Menurut Soemarso (2002), efektifitas pelaksanaan akuntansi akan bertambah, bila mereka mengetahui prinsip-prinsip akuntansi. Setiap orang yang terjun dalam kegiatan perusahaan dari pekerja yang paling rendah sampai pada manajemen dan pemilik, selalu berhubungan dengan akuntansi. Makin tinggi tingkat

wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam struktur organisasi perusahaan, makin banyak konsep-konsep dan istilah-istilah akuntansi yang harus diketahui.

Dengan demikian prinsip dari tanggung jawab keuangan negara adalah setiap orang yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan negara/daerah wajib mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya dan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut harus diaudit oleh lembaga audit yang independen. Tanggung jawab keuangan negara/daerah dalam bentuk aspek administrasi keuangan secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 53 dan 54 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. LK Tahunan Pemda/SKPD disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Pimpinan SKPD.

Pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya. Penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Menurut PP No. 8 tahun 2006 kewajiban bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagaimana sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), kebanyakan pemerintah daerah masih di bantu oleh tim BPKP dengan dibuatnya MOU kerjasama, atau di bantu oleh konsultan IT dengan menggunakan *software* aplikasi akuntansi pemerintahan, dan sebagian lagi mencoba menyusun LKPD dengan sumber daya yang tersedia. Disini terlihat bahwa kurang adanya komitmen dari pimpinan SKPD tersebut terhadap tanggungjawabnya.

Komitmen dapat diartikan kecenderungan dalam diri seseorang untuk merasa aktif dalam suatu kegiatan, harus sanggup menetapkan keputusan untuk dirinya sendiri dan dan melaksanakan kegiatannya tersebut dengan kesungguhan hati dan rasa tanggungjawab. Komiten perlu didukung dengan pengetahuan dan keterampilan, karena tanpa pengetahuan dan keterampilan maka komitmen tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Kelemahan yang paling mendasar pada pemerintah daerah dalam menyusun LKPD terletak pada Sumber Daya Manusianya. Kelemahan ini terlihat dari kebijakan dan praktek SDM yang diterapkan pemerintah daerah yaitu : Rekrutmen CPNS dari sarjana akuntansi masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan. Pengangkatan pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara pada satuan kerja tidak berdasarkan pada kemampuan, keahlian, atau kopetensi. Sedikit sekali pegawai yang memahami tentang SAP dan aturan-aturan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut tidak diminimalisasi dengan mengadakan bintek atau pelatihan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah secara teratur dan berkesinambungan. Pegawai yang telah mengikuti bintek atau pelatihan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah di mutasi dari bagian keuangan dan akuntansi ke bagian lain.

Belum jelasnya jenjang karir bagi sarjana akuntansi yang bekerja pada pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Harifan (2009) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah juga diperoleh kesimpulan bahwa perubahan dalam sistem pencatatan dalam pengelolaan keuangan daerah harus didukung dengan kemampuan sumberdaya yang memadai, salah satunya adalah keahlian (*skill*) yang cukup mengenai pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintah. Namun, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat banyak pegawai yang masih rendah pemahamannya terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Pemenuhan tujuan laporan keuangan tersebut akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komitmen Pimpinan SKPD dan Kualitas**

SDM SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi empiris pada SKPD pemerintahan kota Padang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Sejauhmana pengaruh Komitmen pimpinan SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
2. Sejauhmana pengaruh Kualitas SDM SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris tentang :

1. Pengaruh Komitmen Pimpinan SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Pengaruh Kualitas SDM SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan.
2. Bagi Akademik, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan Akademika.
3. Bagi Sektor Publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan di sektor publik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teoritis

1. Laporan Keuangan Pemerintah

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1 dalam Harahap (2007:121), Tujuan Laporan Keuangan adalah:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:56) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran;

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

2. Neraca;

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Laporan arus kas;

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Catatan atas laporan keuangan

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2004 dalam Harahap (2003:126), karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh

pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi. Informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat di keluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang memiliki kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pada masa lalu.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai laporan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan membantu pencapaian daya banding.

Accounting Principle Board (APB) Statements No 4 dalam Harahap (2007:123) tujuan kualitatif laporan keuangan:

1. *Relevance*

Memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan.

2. *Understandability*

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya.

3. *Verifiability*

Hasil akuntansi harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.

4. *Neutrality*

Laporan akuntansi harus netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak-pihak tertentu saja.

5. *Timeliness*

Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.

6. *Comparability*

Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.

7. *Completeness*

Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai.

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. *Relevan*

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang

berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2. Komitmen Pimpinan

Komitmen dapat diartikan kecenderungan dalam diri seseorang untuk merasa aktif dalam suatu kegiatan, harus sanggup menetapkan keputusan untuk dirinya sendiri dan melaksanakan kegiatannya tersebut dengan kesungguhan hati dan rasa tanggungjawab.

Komitmen perlu didukung pengetahuan dan keterampilan, karena tanpa pengetahuan dan keterampilan maka komitmen tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

a. Pentingnya komitmen menurut Sapeni (2003) dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Komitmen untuk mengubah keadaan merupakan misi anda.
- 2) Komitmen untuk menjadi seseorang pemikir besar menarik orang lain pada anda.
- 3) Komitmen terhadap etika tinggi membangun kepercayaan bawahan atau anggota.
- 4) Komitmen untuk menjadi seorang pemimpin yang peka mengilhami loyalitas.
- 5) Komitmen untuk menjadi komunikator yang efektif mendukung hubungan yang produktif.
- 6) Komitmen untuk memakai kekuasaan secara bijaksana berarti menguasai pengaruh.
- 7) Komitmen untuk mengambil resiko berarti memperluas kemungkinan yang terjadi.
- 8) Komitmen untuk mengambil resiko berarti memperluas kemungkinan yang terjadi.

- 9) Komitmen bersikap berani akan memperkuat keteguhan hati siapa saja.

Berdasarkan PP No.58 tahun 2005 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. Sedangkan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pimpinan SKPD adalah orang yang mempunyai wewenang penuh penggunaan anggara.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, setiap pejabat yang menyajikan Laporan Keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggungjawab atas Laporan Keuangan bersangkutan. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan informasi yang termuat pada Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP.

b. Pimpinan SKPD sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- 3) menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- 4) menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
- 5) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- 6) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 7) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- 8) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

c. Selain itu Pimpinan SKPD juga sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi skpd yang dipimpinnya. Sementara itu pejabat pengguna barang adalah pejabat pemegang kekuasaan kewenangan penggunaan barang milik daerah. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- 1) menyusun RKA-SKPD
- 2) menyusun DPA-SKPD

- 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- 4) melakukan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- 6) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- 8) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD
- 9) mengelola barang milik daerah/kekeayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- 10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- 11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- 12) melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah
- 13) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

Berdasarkan PP No. 8 tahun 2006 kewajiban bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagaimana sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Susilo (2002:3) “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Namun, pelaksanaannya, kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, dua hal yang diperhatikan dalam sumber daya manusia, yaitu :

a. Persaingan dalam sumber daya manusia

sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas sumber daya manusia dari setiap organisasi. Baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya. Kualitas SDM ini diukur dari kemampuan pengetahuannya (knowledge). Pengetahuan disini dimaksudkan dalam arti luas yaitu

kemampuan SDM yang tercermin dari kinerjanya dan terlihat dari perilaku kerjanya yang kompeten, cepat, dan inovatif serta dorongan yang kuat untuk belajar,

Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang – orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam pekerjaan. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah dengan menggunakan semua bakat yang dimiliki sumber daya manusia yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi diluar organisasi mereka.

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Stoner (2002:20) “manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang – orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”. tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah menetapkan kebijaksanaan organisasi untuk dapat meningkatkan kontribusi atau peranan lain. Adapun proses manajemen sumber daya manusia, antara lain :

- 1) perencanaan sumber daya manusia,
- 2) perekrutan sumber daya manusia,
- 3) seleksi sumber daya manusia,
- 4) sosialisasi atau orientasi,

- 5) pelatihan dan pengembangan,
- 6) penilaian prestasi.

Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001(dalam Harifan.2009), kapasitas sumber daya manusia adalah merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun system untuk melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

c. Kemampuan dalam melaksanakan fungsi ini terdiri dari, yaitu:

- 1) Bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup.
- 2) Minimal staf subbagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi.
- 3) Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas.
- 4) Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
- 5) Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.
- 6) Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.
- 7) Telah melaksanakan proses akuntansi
- 8) Memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
- 9) Dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan, dan pengembangan keahlian dalam tugas.
- 10) Adanya dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

B. Penelitian Relevan

Dalam penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara peran pimpinan dan SDM bagian Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun salah satu dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Siska Darman (2009) yang menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam penelitian Darman, populasi atau responden yang digunakan yaitu para auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun secara silmutan (bersama-sama), tetapi pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah masih lemah, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi sangat lemah.

Sejalan dengan itu Penelitian Harifan (2009) meneliti mengenai pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, teknologi informasi, dan pengendalian akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sampel penelitian ini adalah SKPD yang terdapat di Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumberdaya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan adanya terkaitan antara pimpinan dan sdm dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Komitmen

pimpinan melalui kebijakan-kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan kurang tersediannya SDM yang benar-benar berkualitas menjadi permasalahan yang harus diteliti.

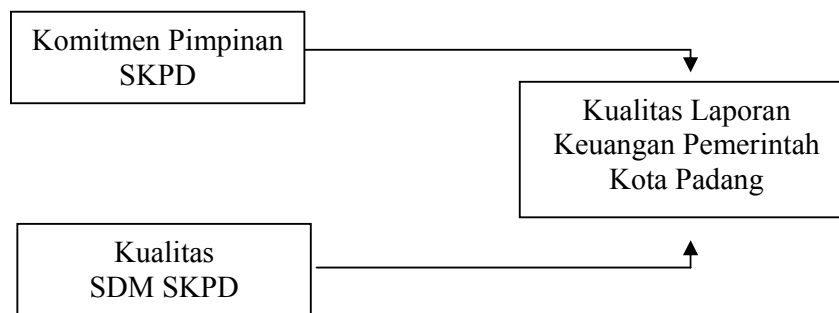
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, komitmen Pimpinan SKPD yang mendukung melalui kebijakan-kebijakan tentang pelaporan keuangan dan kualitas SDM yang kompeten dalam hal penyusunan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan akan menjadi lebih baik di pemerintahan Kota Padang.

Komitmen Pimpinan SKPD adalah keinginan dari pimpinan dengan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Pimpinan SKPD mempunyai wewenang penuh penggunaan anggaran. Kewajiban bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagaimana sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

SDM yang berkualitas dapat membuat Efektifitas pelaksana akuntansi akan bertambah, bila SDM tersebut mengetahui prinsip-prinsip akuntansi. Sehingga semakin berkualitas SDM tersebut maka akan semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dengan adanya komitmen yang nyata dari Pimpinan SKPD terhadap laporan keuangan akan menciptakan tata pemerintahan yang baik yang bisa dipertanggungjawabkan dan membuat masyarakat lebih percaya. Jika dikaitkan Komitmen Pimpinan SKPD dengan kualitas laporan keuangan, maka Komitmen Pimpinan SKPD yang mendukung dalam penyajian laporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan akan semakin baik dan SDM SKPD sebagai pelaksanan dari pembuatan laporan keuangan tersebut merupakan SDM yang berkualitas yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Komitmen Pimpinan SKPD berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

H₂ : Kualitas SDM SKPD berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Padang. Di mana semakin besar Komitmen Pimpinan maka semakin baik pula kualitas dari hasil laporan keuangan (H_1 diterima).
2. Kualitas SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Padang. Di mana semakin baik Kualitas SDM maka semakin baik pula kualitas dari hasil laporan keuangan (H_2 diterima).

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 67,2%. Sedangkan 32,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa Komitmen Pimpinan dan Kualitas SDM telah baik, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pimpinan SKPD sebaiknya lebih meningkatkan Komitmennya dan Kualitas SDM yang membuat laporan keuangan harus sesuai dengan bidangnya agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada Komitmen Pimpinan dan Kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu di mana staf akuntansi SKPD dalam kenyataannya belum sepenuhnya atau belum maksimal dalam membuat laporan keuangan SKPD, namun pada jawaban responden mereka telah mampu melakukannya. Jadi dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada

beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, maka untuk penelitian selanjutnya dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

Daftar pustaka

- Arens, Alvin A, Randal J. Elder & Mark S. Beasley. 2004. *Auditing & Assurance Services An Integrated Approach*, Jakarta: PT. Indeks
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, Syofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2006. Jakarta: Sinar Grafika
- Stoner, A. F. 2002. *Fundamental Of Financial Managing*, Corvalis OR: Authors Academic Publishing, USA, Cetakan Pertama, Alih Bahasa oleh Wandi S. Brata, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Susilo, W, 2002. *Audit Sumber Daya Manusia*, Penerbit Gema Amini, Jakarta.
- Wahjonosumidjo. 1999. *Kepemimpinan dan motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi : Analisis, Desain, dan Pemograman*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada